

Desentralisasi "Biofuel" Mandek

Kondisi wilayah geografis dengan paparan sinar matahari paling berlimpah, disertai curah hujan memadai dan hamparan yang luas, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara paling strategis untuk mengembangkan produksi biofuel atau bahan bakar nabati. Tetapi, desentralisasi biofuel yang sudah dicanangkan pemerintah, di antaranya dengan program desa mandiri energi, tidak bisa berjalan seperti yang diharapkan. Demikian dipaparkan Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Purnardi Djojosedirdjo dalam peringatan satu tahun terbentuknya asosiasi tersebut.

"Indonesia sebenarnya mampu menjadi 'Arab Saudinya biofuel' dengan potensi alam yang ada sekarang. Tetapi, ada pembiaran dari pemerintah yang mengakibatkan industri biofuel berjalan di tempat," kata Purnardi. Purnardi mengatakan, dalam kurun tahun 2005-2006 pemerintah sangat giat mencanangkan program pengembangan biofuel. Baik dari kalangan akademi, peneliti, maupun pengusaha akhirnya merespons kebijakan pengembangan biofuel tersebut.

Beberapa akademisi dan peneliti mulai mengembangkan cara-cara memproduksi biofuel. Pemerintah pun menindaklanjuti dengan membuat prototipe atau proyek percontohan pengolahan biofuel di berbagai wilayah di Indonesia. Para pengusaha juga tidak ketinggalan. Pada tahun 2007 para pengusaha itu menggabungkan diri ke dalam asosiasi yang disebut Aprobi. Investasi pengolahan biofuel pun disiapkan, lima dari sebanyak 22 perusahaan yang tercatat sebagai anggota Aprobi menyediakan pabrik pengolah dengan kapasitas 1,1 juta ton per tahun. Tidak terkait Ketua Tim Nasional Pengembangan Bahan Bakar Nabati Al Hilal Hamdi pada kesempatan itu mengatakan, kendala pengembangan biofuel bisa dijumpai akibat tidak terkaitnya usaha di hulu dan di hilir.

Kemudian hasil riset dan pengembangan tidak sepenuhnya bisa mendukung kelangsungan produksi bahan bakar nabati. "Kegiatan hulu yang ada di Departemen Pertanian, semestinya terkait dengan usaha industri yang berada di bawah departemen lainnya," kata Hilal. Purnardi mengatakan, pemerintah seharusnya mengambil contoh keberhasilan pengembangan biofuel di sejumlah negara. Di seluruh dunia saat ini pemakaian biofuel didorong kebijakan pemerintah. "Filipina membuat undang-undang khusus biofuel yang mengharuskan publik menggunakan bahan bakar itu. Di Indonesia memang ada Keppres (Keputusan Presiden) tentang Bahan Bakar Nabati, tetapi tidak diikuti kejelasan atas insentif yang diberikan, juga tentang kewajiban publik," papar Purnardi.

Berdasarkan data Aprobi, saat ini 22 industri bahan bakar nabati memiliki kapasitas 3,2 juta ton per tahun. Nilai investasinya lebih dari 800 juta dollar AS. Di antara 22 industri itu terdapat lima industri biodiesel yang sudah beroperasi dengan kapasitas terpasang mencapai 1,1 juta ton per tahun. Kelima industri itu meliputi PT Eterindo Group (240.000 ton per tahun), Indobiofuel Energy (50.000 ton per tahun), PT Wilmar (350.000 ton per tahun), PT Sumiasih (100.000 ton per tahun), PT Musimas (300.000 ton per tahun). Dari kapasitas lima industri yang terpasang 1,1 juta ton, menurut Purnardi, saat ini hanya terpakai sekitar 15 persen (150.000 ton per tahun). Ini disebabkan permintaan biodiesel maupun bahan baku dari dalam negeri yang masih terbatas.

Kompas, khoiril anwar (NAW/DOT)